

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ACCRUAL BASIS PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Oleh

Andi Asirah¹, Andi Ratna sari²

E-mail: syra.sheren@yahoo.com

^{1,2} Dosen Universitas Patria Artha

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala-kendala dalam implementasi SAP berbasis akrual serta untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi SAP berbasis akrual. KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 64 Tahun 2013 menggantikan PP nomor 71 tahun 2010. Dengan ditetapkannya PP nomor 64 tahun 2013 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang SAP Berbasis Akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari Basis Kas menuju Basis Akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar telah menerapkan Cash To Akrual (CTA) di tahun 2011 s/d 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Opini WDP yang diperoleh oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2016 menggambarkan belum terpenuhinya tingkat kewajaran informasi yang disajikan untuk suatu item tertentu. Sehubungan dengan telah dilakukannya kick-off implementasi akuntansi berbasis akrual pada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 4 maret 2015 terdapat beberapa kendala yang menjadi permasalahan SKPD Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan 3 (tiga) faktor kendala yang dihadapi SKPD BBLK dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual yaitu SDM pengelola keuangan, SDM pengelola aset yang sering berganti-ganti, dan aplikasi SAIBA. Dalam penelitian ini peneliti menemukan upaya/ solusi yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar atas kendala dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan yaitu: pendidikan dan pelatihan serta update aplikasi.

Kata Kunci: Basis Akrual, Kendala, Upaya

A. PENDAHULUAN

Reformasi Keuangan Negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004. Ketiga UU ini mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (Good Governance) berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengikuti praktik terbaik taraf internasional (international best practices) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dua tahun setelah UU 17 Tahun 2003 diundangkan, pemerintah

mengeluarkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual yang dinamakan Cash toward Accrual.

Namun hingga akhir tahun 2008, lima tahun setelah amanat UU 17 Tahun 2003, pemerintah masih belum dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh (Kusmanadji, 2014). Baru pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual diatur

dan dijelaskan dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.

Akhirnya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan akuntansi berbasis akrual telah terbit. Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar telah menerapkan Cash To Akrual (CTA) di tahun 2011 s/d 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Opini WDP yang diperoleh oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2016 menggambarkan belum terpenuhinya tingkat kewajaran informasi yang disajikan untuk suatu item tertentu. Sehubungan dengan telah dilakukannya kick-off implementasi akuntansi berbasis akrual pada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 4 maret 2015 dapat disimpulkan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual masih belum optimal disebabkan karena beberapa kendala dalam hal penyusunan laporan keuangan.

B. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan/ observasi (observation) dan dokumentasi (documentation).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan menggunakan metode triangulasi data dan triangulasi sumber. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan coding dan analisis data serta interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan/ observasi (observation) dan dokumentasi (documentation).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Validitas dan reliabilitas data ditentukan dengan menggunakan metode triangulasi data dan triangulasi sumber. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan coding dan analisis data serta interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi. Teknik analisis data diuraikan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data sekunder berupa Laporan Keuangan Bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta semua catatan akuntansi dan dokumen terkait.
2. Melakukan reduksi untuk memilah dan mengelompokkan data berdasarkan keperluan dan sejenisnya
3. Melakukan pengamatan terhadap data-data sekunder yang telah dikumpulkan
4. Membuat kesimpulan awal berdasarkan data-data sekunder yang telah dikumpulkan dan dianalisis
 - a. Apabila dari tahap sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa pos-pos yang berkaitan dengan prinsip akrual telah disajikan dalam laporan keuangan Pemda, maka langkah selanjutnya adalah mencari kendala-kendala yang dihadapi

dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

- b. Apabila setelah diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual, langkah selanjutnya adalah memberikan pemahaman tentang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pelaksana/ pembuat laporan keuangan berbasis akrual tersebut.
5. Melakukan wawancara dengan pengelola aset atau yang mewakili
6. Membuat kesimpulan akhir

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan interpretasi atas temuan yang ada sesuai dengan teori/ konsep yang mendukung hasil penelitian. Adapun analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Pelaporan Keuangan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Laporan keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tahun anggaran 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 222/PMK.05.2016 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan belanja selama Tahun Anggaran 2016. Realisasi pendapatan selama Tahun Anggaran 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.188.897.206 atau mencapai 131.34 persen dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp 3.189.363.000. Realisasi belanja Negara untuk periode Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 15.435.539.510 atau mencapai 88.41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 17.458.791.000 (*terlampir pada table 1*)

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 2016. Nilai Aset Tahun Anggaran 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp 31.892.876.938 yang terdiri dari: Aset lancar sebesar Rp 3.268.778.771 aset tetap (netto) sebesar Rp 28.435.328.154; piutang jangka panjang (netto) sebesar Rp 45.969.000. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 279.121.026 dan Rp 31.611.858.899 (*terlampir pada tabel 2*)

c. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 4.462.813.207 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 18.647.969.979 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp (14.185.156.772).

Kegiatan nonoperasional dan pos-pos luar biasa masing-masing surplus sebesar Rp 586.770.841 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (13.598.385.931) (*terlampir pada table 3*)

d. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 33.897.930.390 ditambah defisit-LO sebesar Rp (13.598.385.931) kemudian ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non evaluasi (Rp 147.589.981) sehingga ekuitas akhir tahun anggaran 2016 adalah senilai Rp 31.613.755.912 (*terlampir pada table 4*)

e. Catatan atas laporan keuangan

1) Pagu awal Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Rp 20.082.444.000. Berdasarkan Nomor surat KU.01/03/LI/035/2016, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar mendapatkan pengesahan revisi ke 1 DIPA Nomor: 024.04.2.415655/2015.

- 2) Rekonsiliasi tahun anggaran 2016 dilakukan dengan aplikasi e-Rekon-LK sesuai dengan surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor S-4529/PB.8/2016 dimana aplikasi e-Rekon-LK diakses melalui internet
 - 3) Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode Tahun Anggaran 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan perubahan ekuitas untuk tahun anggaran 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.**

Sehubungan dengan telah dilakukannya kick-off implementasi akuntansi berbasis akrual pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga tanggal 4 maret 2015 terdapat beberapa kendala yang menjadi permasalahan SKPD Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan 3 (tiga) faktor kendala yang dihadapi SKPD BBLK dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual yaitu SDM pengelola keuangan, SDM pengelola aset yang sering berganti-ganti, dan aplikasi SAIBA

a. SDM Pengelola Keuangan

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Peran sumber daya manusia dan aplikasi pendukung menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan basis akuntansi akrual dengan kualitas informasi yang baik. Kendala berkaitan dengan SDM yang belum cukup memadai baik secara kualitas dan kuantitas, baik yang ada pada entitas pelaporan yaitu SKPD dan entitas akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah.

b. SDM Pengelola aset yang sering berganti-ganti

Kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia pengelola aset yang ada pada SKPD yang sering berganti-ganti sehingga pengelola aset tersebut tidak mengetahui aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SKPD tersebut dan aset-aset mana saja yang telah dicatat dan belum dicatat pada aplikasi SAIBA Barang Milik Daerah menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Aplikasi SAIBA

Kendala yang ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan beberapa aplikasi pendukung (SAIBA) dalam hal penyusunan Laporan Keuangan terdapat beberapa transaksi yang belum dapat diproses dengan aplikasi SAIBA antara lain transaksi pada satker Badan Layanan Umum (BLU).

4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

Beberapa kendala dan permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus bisa dicarikan upaya/ solusi oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar untuk bisa mendapatkan opini yang lebih baik atas penyusunan laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan upaya/ solusi yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar atas kendala dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Pendidikan dan Pelatihan

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar masih memiliki kendala berkaitan dengan SDM dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan SDM ini Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui cara dengan melakukan pelatihan dan diklat serta memaksimalkan SDM yang ada dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang ada.

Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan pegawai, baik yang dilaksanakan oleh BBLK Makassar (On the Job Training) maupun yang dilaksanakan oleh pelaksana diklat diluar BBLK meliputi keterampilan, wawasan kelaboratoriuman serta keagamaan sehingga tetap berpegang pada aturan perilaku personel. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan diklat telah pernah dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar tapi masih dalam tahap pengenalan-pengenalan tentang implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kendala SDM pengelola aset yang selalu berganti-ganti Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar melakukan upaya dengan melakukan pembinaan kepada para pengelola aset dan mengusulkan ke pemerintah untuk selalu melakukan pengkaderisasian setiap kali ada pergantian SDM pengelola aset.

b. Update Aplikasi

Berdasarkan Nomor Surat S-9593/PB/2018 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 18 Desember 2018 telah dilakukan release update SAIBA versi 5.3 dengan penambahan menu yang digunakan untuk merekam informasi hasil identifikasi transaksi resiprokal antara BLU dengan entitas Pemerintah Pusat yang akan disajikan pada monitoring resiprokal di Aplikasi e-Rekon & LK.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar telah menerapkan Cash To Akrual (CTA) di tahun 2011 s/d 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan. Opini WDP yang diperoleh oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar atas laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2016 menggambarkan belum terpenuhinya

tingkat kewajaran informasi yang disajikan untuk suatu item tertentu.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan 3 (tiga) faktor kendala yang dihadapi SKPD BBLK dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual yaitu SDM pengelola keuangan, SDM pengelola aset yang sering berganti-ganti, dan aplikasi SAIBA.

Beberapa kendala dan permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus bisa dicarikan upaya/ solusi oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan serta release update SAIBA versi 5.3 dengan penambahan menu yang digunakan untuk merekam informasi hasil identifikasi transaksi resiprokal antara BLU dengan entitas Pemerintah Pusat yang akan disajikan pada monitoring resiprokal di Aplikasi e-Rekon & LK.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini adalah dengan terus memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas baik dalam bentuk pelatihan secara berkelanjutan, dukungan fasilitas dan dana, serta perbaikan terhadap beberapa aturan yang masih tidak sesuai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Ristek Dikti yang telah memberi bantuan dana dan kepala LPPM Universitas Patria Artha yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, H., and Kamase, H.P. 2012. *Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia*. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 6(2), 35–50.

- Herwiyanti, Eliada dkk, 2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19 No. 1, 13-23.
- Kara, E., dan Y. Kilic. 2011. *Accounting Recording System On Accrual Basis At Local Authorities In Turkey: An Application In Gaziantep Local Municipality*. International Journal of Business and Social Science. 2(15).
- Langelo, F dkk. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA 1 V 3 (1), 1-8.
- Madjid dan Ashari, 2013. *Institutionalization of Accrual Accounting in the Indonesian Public Sector*. Journal of Accounting & Organizational Change, 8(3), 257-285.
- Najati, Ida dkk, 2016. Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL: Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 14 No. 1
- Oktifasari, Antin, 2014. Implementasi SAP Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Akuntansi Aset Tetap Daerah Prespektif Opini BPK. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 14 No.02
- Rahmat, 2009. Penerapan Basis AkruaL untuk Pelaporan Keuangan Pemerintah: Perkembangan Global dan Perjalanan Indonesia Menuju Penerapan Basis AkruaL Penuh pada 2015, Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi Infoartha, 3 (12), 1-12
- Risnarningsih, 2016. Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaL. EKSIS. Vol. XI No.2
- Satrio, Dimas dkk. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 18 No. 1, 59-70.
- Syarienda, Yanni dkk. 2018. Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 4 Nomor 1

Lampiran

Tabel 1.
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	CAT	2016		%	2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
PNBP	B.1	3.189.363.000	4.188.897.206	131.34	3.841.035.070
JUMLAH PENDAPATAN		3.189.363.000	4.188.897.206	131.34	3.841.035.070
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	6.262.113.000	6.052.275.007	96.65	5.390.396.183
Belanja Barang	B.4	8.750.757.000	8.526.922.298	136.17	8.066.056.433
Belanja Modal	B.5	2.445.921.000	856.342.205	35.01	9.340.045.273
Jumlah Belanja Operasi		17.458.791.000	15.435.539.510	88.41	22.796.497.889

Sumber: Laporan Keuangan BBLK Makassar

Tabel 2.
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
NERACA
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	CATATAN	TA 2016	TA 2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bendahara pengeluaran	C.1	Rp -	Rp -
Kas dan setara kas	C.2	Rp -	Rp -
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	Rp 2,111,213,235	Rp 1,896,054,105
Piutang BLU	C.4	Rp 819,416,500	Rp 522,500,500
Penyisihan Piutang tak tertagih- Piutang Jangka Pendek	C.5	Rp (232,068,995)	Rp 268,381,978
Piutang BLU (Netto)	C.6	Rp 587,347,505	Rp 254,118,522
Persediaan BLU	C.7	Rp 561,218,031	Rp 697,094,428
Jumlah Aset Lancar		Rp 3,259,778,771	Rp 2,847,267,055
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/ TGR	C.8	Rp 46,200,000	Rp 69,200,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.9	Rp (231,000)	Rp (346,000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		Rp 45,969,000	Rp 68,854,000
Jumlah Aset		Rp 45,969,000	Rp 68,854,000
ASET TETAP			
Tanah	C.10	Rp 4,840,000,000	Rp 4,840,000,000
Peralatan dan Mesin	C.11	Rp 30,481,892,858	Rp 30,932,804,153
Gedung dan Bangunan	C.12	Rp 13,482,253,700	Rp 12,855,248,700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	Rp 58,009,050	Rp 58,009,050

URAIAN	CATATAN	TA 2016	TA 2015
Aset Tetap Lainnya	C.14	Rp 445,898,000	Rp 595,802,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	Rp 20,872,725,454	Rp (18,094,978,258)
Jumlah Aset Tetap		Rp 28,435,328,154	Rp 31,186,885,645
ASET LAINNYA			
Aset lain-lain Badan Layanan Umum		Rp 830,152,500	
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		Rp (680,248,500)	
Jumlah Aset Lainnya		Rp 149,904,000	
JUMLAH ASET		Rp 31,890,979,925	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.16		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.17	Rp 279,121,026	Rp 205,076,310
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 279,121,026	Rp 205,076,310
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 279,121,026	Rp 205,076,310
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	Rp 31,611,858,899	Rp 33,897,930,390
JUMLAH EKUITAS		Rp 31,611,858,899	Rp 33,897,930,390
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 31,890,979,925	Rp 34,103,006,700

Sumber: Laporan Keuangan BBLK Makassar

Tabel 3.
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak			
Lainnya	D.1	Rp 4,462,813,206	Rp 4,261,821,417
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 4,462,813,206	Rp 4,261,821,417
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	Rp 7,888,954,444	Rp 7,748,950,794
Beban Persediaan	D.3	Rp 2,787,239,747	Rp 2,136,686,018
Beban Barang Jasa	D.4	Rp 1,917,605,080	Rp 2,185,969,938
Beban Pemeliharaan	D.5	Rp 1,954,526,939	Rp 942,853,184
Beban Perjalanan Dinas	D.6	Rp 827,563,049	Rp 547,737,010
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	Rp 3,310,405,715	Rp 2,993,311,994
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	Rp (36,427,983)	Rp 266,560,270
Beban Lain-lain	D.9	Rp -	Rp -
JUMLAH BEBAN		Rp 18,649,866,991	Rp 16,822,069,208
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		Rp (14,187,053,785)	Rp (1,256,024,779)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		Rp -	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		Rp 683,280,306	Rp 78,700,000

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp	96,509,465	Rp	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan				
Kerugian Persediaan Rusak/ Usang				
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp	586,770,841	Rp	78,700,000
SURPLUS/DEFISIT LO	Rp	(13,600,282,944)	Rp	(12,481,547,791)

Sumber: Laporan Keuangan BBLK Makassar

Tabel 4.
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
EKUITAS AWAL	E.1	Rp 33,897,930,390	Rp 27,832,904,983
SURPLUS/ DEFISIT LO	E.2	Rp (13,600,282,944)	Rp (12,481,547,791)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON			
REVALUASI		Rp (147,589,981)	Rp 11,039,725
PENYESUAIAN NILAI		Rp	Rp
KEWAJIBAN	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	Rp 11,461,801,434	Rp 18,535,533,473
PENGESAHAN PENGEMBALIAN		Rp	Rp
HIBAH	E.5	-	-
SETORAN SURPLUS BLU	E.6	Rp	Rp
-		-	-
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		Rp (2,286,071,491)	Rp 18,535,533,473
EKUITAS AKHIR		Rp 31,611,858,899	Rp 33,897,930,390

Sumber: Laporan Keuangan BBLK Makassar